

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi belanja pemerintah daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi tersebut pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2018–2022. Berdasarkan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) yang berorientasi output, ditemukan adanya variasi yang signifikan dalam skor efisiensi antar daerah. Sebagian kota seperti Padang Panjang, Solok, dan Bukittinggi menunjukkan efisiensi tinggi secara konsisten, sementara daerah lain seperti Kepulauan Mentawai dan Solok Selatan berada pada posisi relatif tidak efisien. Ketidakefisienan ini tidak selalu berkorelasi dengan besarnya input fiskal yang dimiliki, yang menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya dikonversi secara optimal menjadi output pembangunan, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil ini mencerminkan kesenjangan dalam tata kelola keuangan daerah. Daerah dengan sumber daya yang relatif sama dapat menghasilkan kinerja yang berbeda, tergantung pada manajemen kebijakan dan prioritas pembangunan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan efisiensi tidak harus dilakukan dengan menambah anggaran, melainkan dengan memaksimalkan pemanfaatan input yang tersedia agar berdampak langsung pada hasil pembangunan yang nyata. Efisiensi belanja publik sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, mekanisme perencanaan, dan kapasitas pelaksanaan program.

Untuk menjawab tujuan kedua, yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi, dilakukan estimasi model regresi data panel dengan skor efisiensi DEA sebagai variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel dummy COVID-19 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi belanja dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi krisis selama pandemi mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus dan selektif dalam menggunakan anggaran, terutama melalui realokasi ke sektor-sektor prioritas seperti kesehatan dan perlindungan sosial. Adaptasi kebijakan selama pandemi juga

mendorong efisiensi, meskipun dalam jangka panjang dibutuhkan evaluasi lebih lanjut terkait dampaknya terhadap keberlanjutan layanan publik.

Di sisi lain, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan kapasitas fiskal tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap efisiensi. Tidak signifikannya PDRB per kapita menandakan bahwa tingkat pendapatan suatu daerah belum tentu sejalan dengan kemampuan daerah tersebut dalam membelanjakan anggaran secara efisien. Sementara itu, hubungan positif antara kapasitas fiskal dan efisiensi meskipun tidak signifikan secara kuat mencerminkan bahwa daerah dengan sumber daya yang berlimpah tidak selalu terdorong untuk melakukan pengelolaan anggaran secara optimal, bahkan cenderung berisiko mengalami pemborosan atau inefisiensi akibat lemahnya akuntabilitas. Secara keseluruhan, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah di Sumatera Barat sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan anggaran, efektivitas kebijakan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, bukan semata oleh besarnya kapasitas fiskal atau tingkat kemakmuran ekonomi daerah. Peningkatan efisiensi membutuhkan perencanaan yang strategis, penyusunan prioritas yang jelas, serta tata kelola yang responsif dan akuntabel dalam menghadapi tantangan lokal maupun eksternal.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat kapasitas unit perencanaan dan penganggaran agar dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan efisien. Pelatihan berkelanjutan dalam penganggaran berbasis hasil dan evaluasi kinerja penting dilakukan, terutama menghadapi keterbatasan fiskal. Selain itu, mekanisme pembelajaran antar-daerah perlu difasilitasi agar daerah dengan kinerja efisien dapat menjadi contoh dan mendorong adopsi praktik terbaik di daerah lain. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi belanja sangat diperlukan, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi, termasuk penerapan insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan efisiensi pada sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan. Pandemi COVID-19 menekankan pentingnya kesiapsiagaan fiskal, sehingga pemerintah daerah perlu menyusun kerangka kerja tanggap krisis yang fleksibel dan meningkatkan koordinasi lintas sektor. Dukungan dari pemerintah pusat tetap penting, khususnya

untuk daerah yang belum efisien, melalui penguatan kapasitas teknis, kelembagaan, dan distribusi fiskal yang adil guna mengurangi kesenjangan antarwilayah. Transparansi dan akuntabilitas juga harus diperkuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan memanfaatkan teknologi digital, seperti dasbor kinerja daring, untuk memantau pelaksanaan anggaran secara real-time.

5.2.1 Rekomendasi Kebijakan bagi Pemerintah Daerah

Berdasarkan temuan penelitian mengenai efisiensi belanja pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat yang diukur menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA) dan regresi data panel, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran daerah sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah kabupaten/kota.

1. Pemetaan dan Penyesuaian Alokasi Belanja Berdasarkan Tingkat Efisiensi

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efisiensi belanja menggunakan pendekatan seperti Data Envelopment Analysis (DEA). Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi kabupaten/kota yang efisien dan tidak efisien dalam penggunaan anggaran. Hasilnya dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan pendampingan teknis atau penyesuaian alokasi belanja agar lebih berbasis pada kinerja, bukan hanya besaran penduduk atau pertimbangan politis.

2. Optimalisasi Kapasitas Fiskal Daerah

Meningkatkan kapasitas fiskal terbukti berpengaruh terhadap tingkat efisiensi, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan fiskalnya, terutama melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini bisa dicapai dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendorong diversifikasi ekonomi lokal agar basis penerimaan daerah semakin luas dan berkelanjutan.

3. Reformulasi Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja

Pemerintah perlu memperkuat perencanaan anggaran berbasis output, dengan fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak pembangunan yang nyata, seperti kesehatan dan pendidikan. Penyusunan prioritas anggaran publik dapat

didasarkan pada prinsip efisiensi ekonomi, yaitu dengan mengarahkan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang mampu menghasilkan output pembangunan yang tinggi dengan input seminimal mungkin. Dalam konteks ini, pendekatan efisiensi teknis sebagaimana dijelaskan oleh Farrell (1957) dan dioperasionalkan melalui metode DEA, memungkinkan identifikasi program atau daerah yang paling produktif, sehingga belanja pemerintah dapat diarahkan secara lebih optimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Penguatan Tata Kelola Fiskal dalam Situasi Krisis

Temuan bahwa variabel dummy COVID-19 berpengaruh terhadap efisiensi menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan fiskal dalam menghadapi krisis. Pemerintah perlu membangun mekanisme tanggap darurat yang fleksibel namun akuntabel, termasuk digitalisasi pengelolaan anggaran dan sistem monitoring yang transparan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pada masa krisis seperti pandemi.

4. Penguatan Peran Pemerintah Provinsi dalam Pemerataan

Mengingat adanya kesenjangan efisiensi antar kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan lebih aktif dalam memfasilitasi redistribusi fiskal horizontal serta memberikan bantuan teknis kepada daerah yang efisiensinya rendah. Provinsi juga dapat menjadi penghubung kebijakan antara daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam program pembangunan yang bersifat lintas wilayah.

5. Integrasi Evaluasi Efisiensi dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Nilai efisiensi hasil DEA dapat dimanfaatkan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra SKPD. Hal ini penting untuk menjamin bahwa anggaran tidak hanya dihabiskan, tetapi benar-benar digunakan untuk menghasilkan output pembangunan yang optimal. Evaluasi berbasis efisiensi juga dapat memperkuat sistem reward dan punishment dalam tata kelola keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penggunaan hanya tiga variabel input (pendapatan per kapita, belanja per kapita, dan jumlah penduduk) dan tiga variabel output (Umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per

kapita yang disesuaikan) sangat menyederhanakan kompleksitas efisiensi belanja pemerintah daerah. Selain itu, pendekatan regresi yang digunakan mengasumsikan hubungan linear dan homogen antar variabel, sehingga mungkin belum mampu menggambarkan dinamika yang lebih kompleks. Keterbatasan data dan waktu observasi selama lima tahun juga membatasi analisis jangka panjang. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel dan metode yang lebih komprehensif dengan cakupan waktu yang lebih luas untuk mendapatkan gambaran efisiensi yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan lokal maupun nasional. Dalam kondisi fiskal yang terbatas dan meningkatnya tuntutan masyarakat, efisiensi menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kemajuan nyata bagi masyarakat.

